

KESANTUNAN BERBAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK*Beberapa Tilikan Kasus Akhmad Fathanah di Media Harian Tempo*

MUJIATI LA SAADI

*Dosen Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia STKIP Hatta-Sjahrir**e-mail korespondensi: mujilasaadi@yahoo.com*

FADLY KASDAM

*Dosen Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia STKIP Hatta-Sjahrir***ABSTRAK**

Dalam wacana politik, tujuan penggunaan bahasa umumnya untuk menutupi kekurangan, melarikan diri dari tanggung jawab, menangkis serangan lawan politik, menutupi topeng kebusukan, menjatuhkan mental, meneror, atau bahkan menakut-nakuti lawan. Seorang politisi dalam menggunakan bahasa pastilah menyiratkan kesantunan, baik yang positif maupun yang negatif untuk menjatuhkan lawan politiknya serta untuk penyelamatan muka. Penentu kesantunan tidak hanya bentuk bahasa itu sendiri, melainkan juga bentuk bahasa dan konteksnya, yang antara lain latar penggunaan, partisipan, tujuan, instrumen, norma, dan genre. Seperti halnya kasus Akhmat Fathanah yang termuat dalam media massa ‘Harian Tempo’ menyiratkan berbagai strategi kesantunan sebagai upaya penyelamatan muka. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah teks yang mengandung kesantunan berbahasa. Sumber data penelitian ini adalah media massa “Harian Tempo” edisi 31 Januari 2013 dan 6 Mei 2013. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode baca-catat. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan formulasi Model Person Brown dan Levinson, yaitu rasionalitas dan muka. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kesantunan yang diterapkan berupa tanpa basa basi menuduh atau menyudutkan salah satu pihak tertentu, kesantunan positif dengan masih memercayai dan menghargai orang lain, dan kesantunan negatif sebagai upaya perlawanan untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus korupsi AF yang termuat dalam media massa Harian Tempo bahwa kritik, ketidaksetujuan, keluhan, dan sebagainya boleh saja dikemukakan dalam suatu wacana politik, asalkan memilih strategi kesantunan yang tepat karena dapat membantu menciptakan citra elegan di hadapan masyarakat terkait kedudukan politiknya.

Kata Kunci: *Kesantunan Berbahasa, Wacana Politik, Media Massa*

PENDAHULUAN

Studi komunikasi politik antara lain berkaitan dengan persoalan mengkaji propaganda, kampanye politik, dan sosialisasi politik. Sejalan dengan istilah politik itu sendiri yang bertalian dengan masalah pengaturan masyarakat secara berkekuasaan, maka diperlukan pengorganisasian rakyat banyak (Santoso, 2006: 89). Tentu saja, dibutuhkan suatu alat komunikasi yang dapat menguasai pola pikir rakyat banyak dan mengubah perspektif mereka. Kegiatan politik tidak hanya mengurus masalah-masalah teknik kerja lapangan, tetapi juga masalah komunikasi yang mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik.

Aditjondro (dalam Rahardjo, 2010:70) menyatakan bahwa untuk melihat dinamika kekuasaan diperlukan kajian yang mendalam terhadap bentuk-bentuk wacana resmi yang menjadi produk kekuasaan itu. Memahami suatu wacana tidak hanya melihat kode luarnya, tetapi makna apa yang tersembunyi di balik kode tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Piliang (1999:58) bahwa ketika melihat wacana, permasalahan yang penting bukan hanya sekadar memahami bagaimana suatu peristiwa dan objek wacana dipahami maknanya, melainkan sebagai bagian dari studi wacana dapat menyingkap kode-kode yang tersembunyi dengan memahami jenis kekuasaan apa yang beroperasi dan apa efek dari kekuasaan tersebut. Di sini menjadi jelas bahwa wacana merupakan tempat beroperasinya relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dengan demikian studi wacana hakikatnya adalah upaya memahami apa yang dikatakan orang (Stubbs, 1993:30).

Semua gerakan politik dan ideologi telah mencari, entah sadar atau tidak, untuk mewujudkan kata-kata dan simbol yang sesuai dengan tujuan mereka. Dalam hal ini bahasa tidak lagi hanya sebagai alat dan medium yang netral untuk menjelaskan realitas sosial, tetapi bahasa juga tampil sebagai representasi dari berbagai macam kuasa. Hal ini sebagaimana dikemukakan Foucault (1972:216) *“Language as a discourse is never neutral and is always laden with rules, privileging a particular group of knowledge while excluding others.”*

Merujuk pernyataan di atas, dapat ditemukan bahwa penggunaan bahasa tidak lagi dimengerti dalam perspektif konvensional yakni sebagai alat dan

medium netral untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial dan politik, tetapi sebagai representasi dari *deployment* (pagelaran) berbagai kekuatan. Van Dijk (1985:43); dan Stubbs (1983:30) menyatakan fokus analisis wacana politik adalah makna ideologis dalam sebuah teks, yaitu studi mengenai cara-cara bagaimana makna tersebut digunakan untuk membenarkan dominasi melalui bahasa. Dengan begitu analisis wacana politik tidak hanya terfokus pada bagaimana dan apa makna ideologis yang terkandung dalam teks, tetapi juga untuk mengaji bagaimana kekuasaan disalahgunakan atau bagaimana dominasi dan ketidakadilan dijalankan dan diproduksi melalui teks (bahasa) dalam konteks sosial politik.

Studi bahasa politik juga menjadi persoalan sentral dalam tradisi lain dalam studi komunikasi politik. Salah satunya adalah adanya analisis yang luas mengenai isi media massa, khususnya berita. Pemberitaan dalam media massa, apakah itu bersifat pribadi atau publik, muncul untuk membawa pesan konsensus sosial yang sedang berkuasa dan juga mendukung peraturan sosial dan politik yang sudah terwujud dan mapan dengan beragam cara, yaitu dengan memberi legitimasi dan perhatian untuk mewujudkan kekuasaan; dengan mendinginkan masalah dan mencari solusi alternatif; dengan mengarahkan perhatian kepada “kambing hitam”, dengan memberi label pada lawan politik sebagai ekstrimis yang mencoba menantang aturan yang sudah mapan dan semuanya di dalam sistem yang demokratis. Santoso (2006:82) mengemukakan bahwa bahasa dalam dimensi politik terkesan licik, bohong, kotor, mau menang sendiri. xenophobia, khaufinistik, dan feodalistik.

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa bahasa merupakan unsur penting dalam komunikasi politik di samping aspek komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek. Selain itu, bahasa juga menjadi salah satu bagian penting dalam kajian komunikasi politik karena penggunaan bahasa komunikator politik memiliki efek domino dalam keterpilihan seseorang di lembaga legislatif maupun kepresidenan, sampai untuk menjatuhkan lawan politik manakala memunyai pandangan politis berbeda. Dengan begitu terbaikannya unsur kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik dapat berakibat memanasnya hubungan antarkomunikator yang terlibat.

Kesantunan berbahasa merupakan hal yang diperhatikan dalam komunikasi. Berdasarkan teori pargamtik, ketika seseorang menggunakan bahasa pastilah menyiratkan kesantunan, baik yang positif maupun yang negatif. Sama hal dengan bahasa yang digunakan oleh para orang-orang yang saling beradu opini (wacana) untuk meraih kekuasaan politik yang terekam di media cetak “Harian Tempo” menyiratkan kesantunan, demi untuk menyelamatkan muka, baik positif maupun negatif. Seperti halnya kasus Akhmat Fathanah yang menggandeng Lutfiah Hasan Ishaq dari Partai Keadilan Sejahtera yang termuat dalam media massa “Harian Tempo ” memuat pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan di antara lawan politiknya. Santoso (2006:82) mengemukakan alasan mengapa hal tersebut dilakukan adalah tujuan penggunaan bahasa secara politis adalah untuk menutupi kekurangan, melarikan diri dari tanggung jawab, menangkis atau menghindari serangan lawan politik, membungkus kebusukan dengan bahasa keemasan, menjatuhkan mental lawan, meneror atau menakut-nakuti masyarakat.

Hasil telaah kasus ini bermanfaat sebagai rujukan konseptual berkaitan dengan penggunaan kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik di media massa. Selain itu, juga bermanfaat sebagai bahan informasi tentang realisasi penggunaan kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik di media massa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah teks yang mengandung kesantunan berbahasa dalam komunikasi politik di media massa. Sumber data penelitian ini adalah media massa “Harian Tempo” edisi 31 Januari 2013 sampai 6 Mei 2013. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode baca-catat. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan formulasi Model Person Brown dan Levinson, yaitu rasionalitas dan muka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa strategi kesantunan yang diterapkan oleh para politisi dalam komunikasi politiknya merupakan representasi gejala politik yang cenderung mengabaikan unsur keetisan sebuah pernyataan. Apalagi bila berhubungan dengan lawan politiknya yang berbeda pandangan politik.

Komunikasi Politik Kasus Akhmat Fathanah di Harian Tempo

Komunikasi politik di media massa “Harian Tempo” didominasi pemberitaan terkait kasus suap impor daging sapi, anggota dewan perwakilan rakyat Akhmad Fathanah (AF) yang diduga didalamnya juga melibatkan salah satu politisi dari partai politik (parpol) yang berlandaskan agama Islam. Wacana ini sudah digaungkan sejak awal bulan Januari 2013, yaitu diawali dengan wacana team Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke rumah Presiden Pengurus Partai Keadilan (PKS), Lutfiah Hasan Ishaq (LHI) dan membawa LHI menuju kantor KPK dengan kijang Inova. Tindakan ini membuka wacana adanya dugaan bahwa LHI menerima suap dari AF seperti tertulis dalam Harian Tempo edisi 31 Januari berikut ini.

..... Ia dibawa dari kantor Dewan Pengurus Pusat PKS, Pasar Minggu, menjelang tengah malam, dengan Kijang Innova milik KPK. "Akan dibawa ke KPK," kata penyidik KPK, Komisaris Polisi Novel Baswedan, di kantor PKS. Novel, yang kemudian duduk di samping Luthfi, tak menjelaskan apakah Komisi akan langsung menahan atau memeriksa Luthfi. (Tempo, 31 Januari 2013).

Berjalannya waktu, komunikasi politik kasus Akhmat Fathanah ini diwarnai berbagai wacana baru seperti pencucian uang dan pemberhentian LHI dari jabatan Presiden PKS. Setiap wacana yang muncul dalam panggung politik merupakan bentuk pertarungan kekuasaan di antara para politisi. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik tersebut tentu menggunakan berbagai strategi kesantunan sebagai bentuk penyelamatan muka.

Strategi Kesantunan Tanpa Basa Basi Sebagai Upaya Menyudutkan

Strategi kesantunan tanpa basa basi dalam komunikasi politik kasus AF di Harian Tempo dilakukan oleh pihak KPK. Hal ini ditunjukkan dengan penuduhan

KPK terhadap AF terkait kasus suap daging sapi. Awalnya kasusnya adalah saat AF di tangkap oleh team KPK di sebuah hotel di Jakarta. Saat penangkapan ditemui terdapat uang sebesar 1 milyar yang diduga adalah uang hasil suapan. Uang tersebut oleh team KPK diduga berasal dari Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy yang merupakan dua pengusaha PT Indoguna Utama. Johan Budi (JB), juru bicara KPK membocorkan bahwa uang tersebut merupakan penganggaran impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Uang itu, Johan melanjutkan, diduga terkait dengan penganggaran impor daging sapi di Kementerian Pertanian. "Dari hasil pemeriksaan, ditemukan hubungan bahwa uang yang diterima AF ini mengalir ke LHI (Lutfhi Hasan Ishaq)," kata Johan kemarin. (Tempo, 31 Januari 2013)

Pernyataan Johan Budi tersebut merupakan suatu bentuk menyudutkan AF bahwa telah melakukan aksi penyuaan. Selain itu, pernyataan ini juga sebagai upaya menuduh bahwa LHI telah menerima uang suap dari AF. Tindakan penuduhan ini didasarkan dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan bahwa terdapat rekening mencurigakan AF ke KPK dan KA dan nama pemilik rekening transaksinya, yaitu ustad LHI. Laporan hasil analisis ini menjadi dasar LHI tersangka suap kasus impor daging sapi.

Dalam hal ini, strategi kesantunan yang digunakan JB, juru bicara KPK dengan menerapkan strategi terus terang tanpa basa-basi (*on record without redressive action*) adalah tindakan pengancam muka. Strategi ini dilakukan seorang penutur karena merasa lebih superior (*more powerfull*) dibandingkan petutur dengan tanpa mengancam muka si penutur.

Dalam relasi kekuasaan, menurut Foucault (1972) orang atau sekelompok orang mengontrol orang atau kelompok lain tidak harus secara fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis lewat wacana. Ini menyiratkan bahwa JB yang bernaung di bawah KPK sebagai penutur melakukan bentuk kontrol politik terhadap LHI yang naung di partai islam. Tentulah JB merasa KPK adalah institusi lebih tinggi (superior) dan berkuasa dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan begitu, kelompok superior atau kelompok yang dominan akan dapat membuat kelompok yang didominasi bertindak seperti yang diinginkan

olehnya, karena kelompok yang dominan lebih memiliki akses berupa kekuasaan, ekonomi, bahkan pengetahuan ketimbang yang didominasi.

Strategi Kesantunan Positif Sebagai Upaya Menghargai

Strategi kesantunan positif digunakan sebagai bentuk penyelamatan muka dalam komunikasi politik kasus Akhmat Fathanah di Harian Tempo, yaitu dilakukan oleh LHI. Hal ini ditunjukkan dengan ‘tindakan terkejut’ saat mendengar pernyataan Johan Budi sebagai juru bicara KPK.

Lutfhi mengaku terkejut mendengar kabar itu. Ia membantah menerima suap. "Tentu itu tidak benar. Saya tak akan menerimanya," kata Luthfi dalam konferensi pers di kantor PKS itu. (Tempo, 30 Januari 2013)

Sebagai partai yang berlandaskan dan menjunjung nilai-nilai keislaman, pastilah mendapatkan kecorengan atas nama baiknya. Ujaran Johan Budi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa Johan sebagai penutur mempunyai penilaian negatif terhadap LHI sebagai tokoh yang sangat dihormati dalam PKS, yaitu partai yang mengusung nilai keislaman. Merasa mukanya terancam, LHI mengeluarkan pernyataan “*Tentu itu tidak benar. Saya tak akan menerimanya*” sebagai bentuk penyelamatan mukanya.

Strategi kesantunan positif juga dilakukan oleh Wakil presiden PKS yang membela dan memercayai LHI tidak melakukan tindakan itu. Tentu saja secara kelembagaan, LHI adalah politisi asal PKS yang nota bene berasaskan islam sedangkan Johan Budi adalah juru bicara KPK yang nota bene memberantas korupsi. Hal ini tidak hanya merusak nama baik LHI, tetapi juga mencoreng citra partai. Wakil presiden PKS menyerang JB telah melakukan tindakan kebohongan publik sebagai tindakan penyelamatan muka.

Wakil Presiden PKS menyerang Johan dengan mengatakan bahwa melakukan kebohongan publik, mereka telah melakukan suatu sandiwara fitnah yang menjatuhkan nama baik LHI dan juga nama baik partai.

Dalam kajian politik, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sesuatu yang alamiah, wajar dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Demikian halnya JB dan wapres PKS tersebut tentu saja melakukan pertarungan kekuasaan lewat bahasa politik yang dituturkan. Akan tampak sangat jelas

melalui penonjolan pemakaian kata-kata dan ungkapan tertentu akan dilihat besar dan jenis kekuasaan seseorang (Eriyanto, 2001:12). Wapres PKS memilih simbol “pembobongan publik” sebagai bentuk penonjolan kata-kata untuk menyerang balik JB. Tindakan ini merupakan strategi kesantunan yang digunakan sebagai bentuk penyelamatan muka dari pihak PKS.

Strategi Kesantunan Negatif Sebagai Upaya Perlawanan untuk Mempertahankan Eksistensi

Strategi kesantunan negatif dalam komunikasi politik dilakukan oleh Johan Budi saat menyerang balik muka positif LHI yang bersembunyi di balik topeng “keterkejutan”. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Johan Budi bahwa KPK memunyai dua bukti terkait kasus suap yang melibatkan LHI.

Sebelumnya, KPK menetapkan Lutfhi sebagai tersangka suap kasus impor daging sapi. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan komisi antirasuah sudah mendapatkan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu. (Tempo, 31 Januari 2013)

Pernyataan Johan Budi tersebut sebagai upaya menyelamatkan muka atas bantahan LHI terkait kasus suap. Merasa bahwa kedudukannya sebagai aktivis pemberantas korupsi, tentu saja Johan tidak tinggal diam. Tidak ingin KPK dilabeli ‘asal bunyi’, berbicara tanpa bukti, Johan dengan tegas mengatakan bahwa memiliki bukti terkait keterlibatan LHI dengan kasus suap AF. Tindakan Johan ini merupakan upaya mempertahankan eksistensi dirinya sebagai aktifis pemberantasan korupsi.

Strategi kesantunan negatif dalam komunikasi politik juga dilakukan oleh pihak PKS. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan memberhentikan LHI dari jabatan presiden PKS. Tindakan ini dilakukan oleh pihak partai sebagai upaya perlawanan untuk mempertahankan eksistensi partai karena pernyataan KPK bahwa LHI terlibat kasus suap. Dengan diberhentikannya LHI merupakan bentuk penyelamatan muka atas citra baik partai bahwa tidak ada hubungannya dengan pribadi LHI. Mereka tidak akan mencampuri atau melindungi LHI jika bisa dibuktikan secara sah dia bersalah.

Berbagai strategi kesantunan yang digunakan dalam komunikasi kasus Akhmat Fathanah di media massa 'Harian Tempo' tersebut merupakan representasi gejolak politik yang cenderung mengabaikan unsur keetisan atau kesopanan sebuah pernyataan apalagi jika berhubungan dengan lawan politiknya. Hal ini menunjukkan hegemoni kelompok atau individu satu atas lainnya sebagaimana dikemukakan Habermas bahwa bahasa tidak hanya memunculkan bias dan kepentingan untuk terjadinya distorsi pseudo komunikasi, tetapi juga membawa unsur dominasi dan paksaan-paksaan.

Terkait dengan kasus ini, harus diingat bahwa bagi orang Indonesia, menurut hasil penelitian Gunarwan (1992) memang ada kesejajaran di antara ketaklangsungan tindak tutur dan kesantunan pemakaiannya. Hanya saja, kesejajaran itu tidak selamanya berlaku. Artinya, semakin tidak langsung bentuk ujarannya, tidak selalu berarti semakin santun penggunaannya. Kritikan yang diberikan yang bukan berasal dari lawan politik hendaknya juga disampaikan secara langsung karena tidak ada indikasi atau memuat unsur politik tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan bahwa para politisi menerapkan berbagai strategi kesantunan dalam komunikasi politiknya. Strategi kesantunan yang digunakan dalam komunikasi politik di media massa *Harian Tempo* berupa tanpa basa basi menuduh atau menyudutkan salah satu pihak tertentu, kesantunan positif dengan masih memercayai dan menghargai orang lain, dan kesantunan negatif sebagai upaya perlawanan untuk mempertahankan eksistensi dirinya.

Dalam kasus korupsi Akhmad Fathanah yang melibatkan Presiden PKS tersirat pelajaran bahwa kritik, ketidaksetujuan, keluhan, dan sebagainya boleh saja dikemukakan dalam suatu panggung politik, asalkan memilih strategi kesantunan yang tepat. Bila tidak, akan memicu munculnya konflik antarpartisipan. Padahal, pemilihan strategi kesantunan yang tepat, akan dapat saling bisa menjaga muka, baik diri sendiri maupun orang lain, tanpa menghilangkan substansi yang menjadi persoalan pokok pembahasan di panggung

politik. Kesantunan berbahasa juga dapat membantu menciptakan citra elegan di hadapan masyarakat terkait kedudukan politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Penelope dan Stephen C. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chomsky, Noam. 2005. *Kuasa Media*. Yogyakarta: Pinus.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS
- Foucault, Michel. 1972. *The Archeologi of Knowledge & The Discourse on Language*. New York: Patheon Books.
- Kasper, Gabriele. 1996. "Politeness," dalam Jef Verschueren, J. –O. Ostman, J. Blommaert, C. Bulcaen (eds.). *Handbook of Pragmatics*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Koran Tempo (online) Edisi 31 Januari 2013 & 06 Mei 2013.
- Pilliang, Yasraf Amir. 1999. *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Santoso, Anang. 2006. *Bahasa, Masyarakat, dan Kuasa: Topik-topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa*. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Universitas Negeri Malang.
- Schiffrin, Deborah. 2007. *Ancangan Kajian Wacana*. Editor oleh Abdul Syukur Ibrahim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stubbs, Michael. 1983. *Discourse Analysis: The Sociolinguistics Analysis of Natural Language*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Van Dijk, A.T. 1985. *Handbook of Discourse Analysis*. Volume 4. London: Academic Press.